Katalog: 9302023.8202

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN

2012-2016

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN

2012-2016

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2012-2016

ISBN: 978-602-662110-8
Nomor Publikasi: 82020. 1703
Katalog: 9302023.8202

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: xii + 64 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:
Ekonomi Rumah Tangga

Sumber Ilustrasi:
-

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh:
CV. Tara Taro

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2012-2016

Pengarah:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:
Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Penulis:
Cahya Danu Rahman, SST

Pengolah Data:
Cahya Danu Rahman, SST

Desain:
Cahya Danu Rahman, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2012-2016 merupakan publikasi yang menyajikan pembahasan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran atau permintaan akhir. Pengeluaran ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, dan Ekspor Neto Antar Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya publikasi ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami mengharapkan tanggapan dan saran untuk meningkatkan kualitas publikasi yang akan datang.

Weda, September 2017
Kepala BPS
Kabupaten Hamahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

PENJELASAN SIMBOL

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	–
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	e
Angka sementara	:	x
Angka sangat sementara	:	xx
Angka diperbaiki	:	r

2. SATUAN

barel	:	158,99 liter = 1/6,2898 m3
hektar (ha)	:	10 000 m2
kilometer (km)	:	1 000 meter m)
knot	:	1,8523 km/jam
kuintal	:	100 kg
KWh	:	1 000 Watt hour
MWh	:	1 000 KWh
liter (untuk beras)	:	0,80 kg
ons	:	28,31 gram
ton	:	1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Investasi Fisik, serta Ekspor dan Impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*), meskipun PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran

menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep, penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian, PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk permintaan akhir. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan

dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat , yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta Inventori + X - M$$

Y (Income)	= PDRB Produksi
C (Consumption)	= Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini, dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Alasan Tahun Dasar PDRB Perlu Dirubah

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Salah satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia, kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya, nilai PDB maupun komponennya dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Penjelasan SNA 2008

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Manfaat Perubahan Tahun Dasar

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB di antaranya adalah:

1. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas PDRB;
3. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Implikasi Perubahan Tahun Dasar

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

1. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
2. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
3. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Alasan Tahun 2010 Sebagai Tahun Dasar

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
2. Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
5. Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
6. Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 di antaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
    1. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources*/CBR). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contohnya yaitu nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
    2. Sistem persenjataan (*military weapon systems*/MWS). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
    3. Penelitian dan pengembangan (*research and development*/RnD). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan

PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

4. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation*/MEE). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
5. Bank Sentral (*Central Bank*/CB). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
6. Perangkat lunak (*computer software and databases*/CSD). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan basis data yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
7. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals*/ELA). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

- Metodologi

  Output jasa intermediasi keuangan yang diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured* /FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).
- Valuasi

  Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi
  Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor lainnya.

Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu wilayah. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik

3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, minuman, dan rokok
2. Pakaian dan alas kaki
3. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga
4. Kesehatan dan pendidikan
5. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya
6. Hotel dan restoran
7. Lainnya

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
2. Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
3. Sensus Penduduk 2010, BPS
4. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
5. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku)
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat)
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya, LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: 1) Organisasi kemasyarakatan; 2) Organisasi sosial; 3) Organisasi

profesi; 4) Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi; 5) Lembaga swadaya masyarakat; 6) Lembaga keagamaan; dan 7)Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, dan BBN.

Sumber Data

1. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
2. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
3. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
4. Indeks Harga Konsumen, BPS

Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah

tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti musyawarah nasional, rapat kerja daerah, dan penanganan bencana
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku)
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat)
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang,

perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup:

a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota;

b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan;

c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

1. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
2. Statistik Keuangan Daerah, BPS
3. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
4. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
5. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
6. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan.
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat

diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*)
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PMTB kabupaten/kota tahunan adalah:

1. Output industri konstruksi, BPS
2. Nilai impor 2 digit HS, BPS
3. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
4. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
5. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
6. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
7. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
8. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
9. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
10. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

<u>PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik)</u> = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

<u>PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)</u> = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply* : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total *Supply* Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori

Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode

(akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi
2. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & *supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi
3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai)

5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak.

Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

1. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

<u>PI atas dasar harga Berlaku</u> = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

<u>PI atas dasar harga Konstan</u> = PI atas dasar harga Berlaku /IHPB

2. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 Ekspor dan Impor

Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
2. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metoda tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 sampai dengan 2016, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Secara total, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2016 meningkat sebesar 14,63% dari tahun 2015 , yakni dari 1.543,496 miliar Rupiah menjadi 1.769,299 milliar Rupiah. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, meningkat dari 1.134,431 Miliar Rupiah menjadi 1.262,007 Miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 11,25%.

Selama periode 2012-2016 kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah mengalami fluktuasi. Peningkatan perekonomian Kabupaten Halmahera Tegah di tahun 2013 tidak diikuti pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014 perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah turun sampai 1,9%, hal ini disebabkan karena adanya aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai larangan ekspor mineral mentah yang mengakibatkan tidak ada ekspor hasil tambang dari Kabupaten Halmahera Tengah ke luar negeri di tahun tersebut.

Perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2015 dan 2016 mulai menunjukkan pemulihan. Perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,34% meskipun pada tahun tersebut masih tidak ada ekspor hasil tambang ke luar negeri. Hal itu disebabkan karena di tahun tersebut perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah mulai melakukan pembangunan *Smelter.*

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

(miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	422,66	463,82	522,64	603,70	644,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14,55	17,16	20,05	23,25	23,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	359,14	418,84	471,74	560,53	617,13
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	473,97	503,90	561,84	698,65	725,22
5. Perubahan Inventori	75,06	53,70	- 23,70	130,63	- 21,06
6. Ekspor	594,84	449,77	661,44	679,92	1 140,06
7. Impor	728,38	558,60	812,77	1 153,18	1 360,61
PDRB	**1 211,84**	**1 348,60**	**1 401,24**	**1 543,50**	**1 769,30**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016 menunjukan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 11,25%. Pertumbuhan yang signifikan ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut sudah mulai beroperasinya *smelter* sehingga ada ekpor barang hasil tambang ke luar negeri.

Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Tengah ADHB selama periode tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016
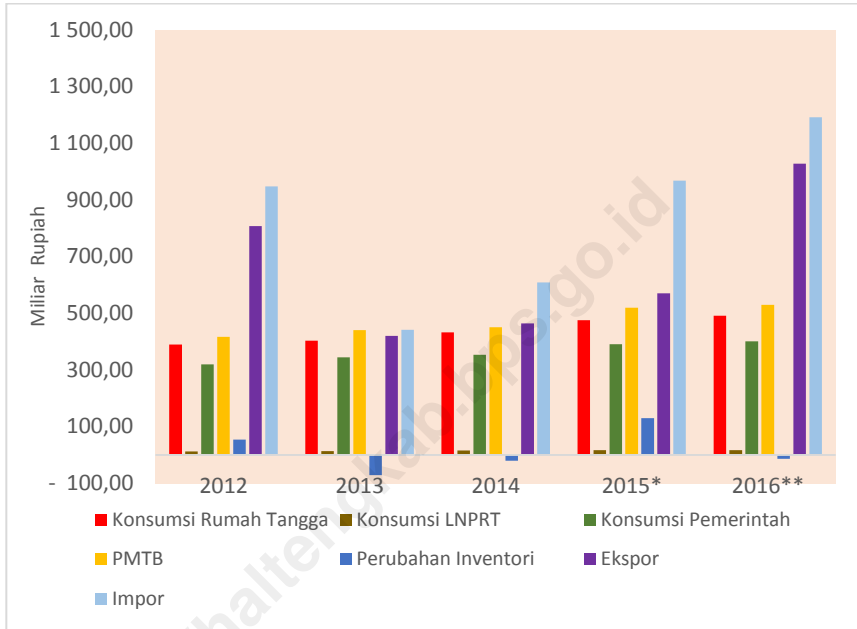
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten

Halmahera Tengah pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

(miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	389,08	402,76	432,96	476,03	491,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,75	14,04	15,64	17,05	17,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	319,46	343,94	352,93	390,24	401,12
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	416,73	440,89	450,76	519,17	529,28
5. Perubahan Inventori	53,86	- 71,56	- 20,65	129,61	- 13,34
6. Ekspor	807,97	420,25	463,90	570,47	1 028,16
7. Impor	947,27	442,00	608,33	968,13	1 191,64
PDRB	**1 052,59**	**1 108,32**	**1 087,22**	**1 134,43**	**1 262,01**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Terjadi peningkatan PDRB di tahun 2013 tetapi di tahun 2014 nilainya menurun dari 1.108,32 miliar rupiah (2013) menjadi 1.087,22 miliar rupiah (2014). Namun di dua tahun berikutnya terlihat ada pemulihan ekonomi, nilainya terus meningkat menjadi 1.134,43 miliar rupiah (2015) dan 1.262,01 miliar rupiah (2016).

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016
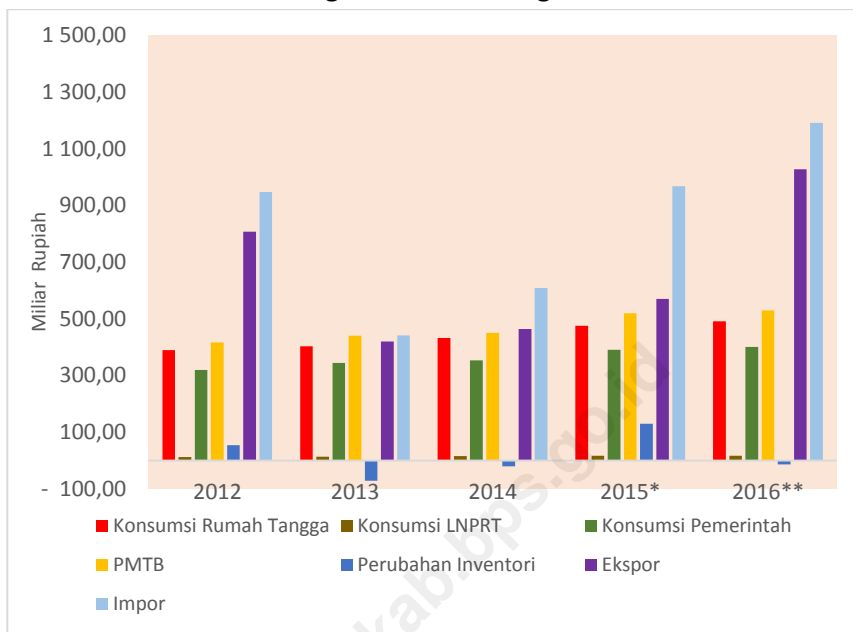
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016
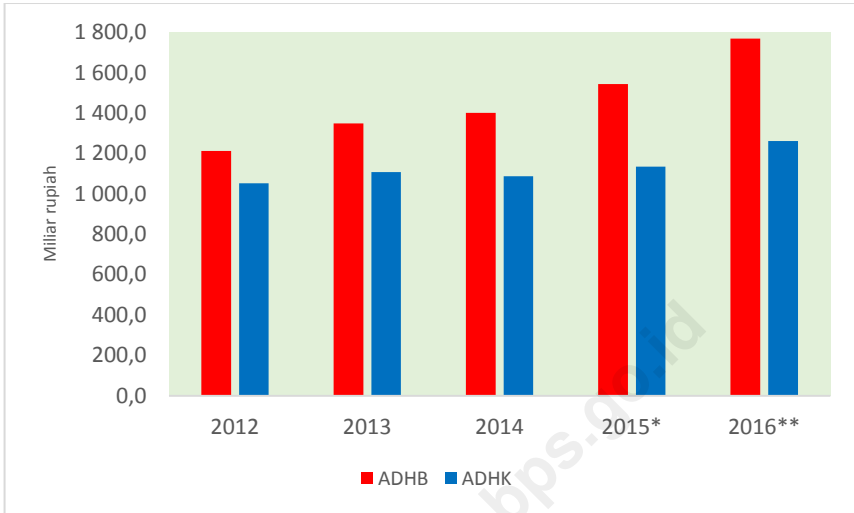
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung selalu meningkat dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDB merupakan kontribusi dari seluruh komponen pengeluaran, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau Ekspor Barang dan Jasa minus Impor Barang dan Jasa. Terlihat bahwa selama periode 2012-2016, pengeluaran untuk pembentukan kapital (PMTB) menjadi penyumbang terbesar dalam

pembentukan perekonomian di Halmahera Tengah karena wilayah pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah belum lama dipindahkan, sehingga investasi perlu dilakukan guna memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga berkontribusi besar dengan kontribusi sekitar 34 hingga 40 persen.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Kabupaten Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

(persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	34,88	34,39	37,30	39,11	36,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,20	1,27	1,43	1,51	1,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29,64	31,06	33,67	36,32	34,88
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	39,11	37,36	40,10	45,26	40,99
5. Perubahan Inventori	6,19	3,98	- 1,69	8,46	- 1,19
6. Ekspor	49,09	33,35	47,20	44,05	64,44
7. Impor	60,11	41,42	58,00	74,71	76,90
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami kondisi yang sedikit fluktuatif, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 sebesar 1,9 persen, hal ini

disebabkan karena adanya larangan bagi perusahaan tambang melakukan ekspor hasil tambang mentah yang berdampak pada berkurangnya nilai ekspor barang dan jasa. Namun di tahun-tahun berikutnya, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah terus membaik, terlihat dari makin meningkatnya pertumbuhan ekonominya.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

(persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	3,51	7,50	9,95	3,17
Konsumsi LNPRT	10,10	11,42	9,00	1,55
Konsumsi Pemerintah	7,66	2,61	10,57	2,79
PMTB	5,80	2,24	15,17	1,95
Ekspor	- 47,99	10,39	22,97	80,23
Impor	- 53,34	37,63	59,15	23,09
PDRB	**5,29**	**- 1,90**	**4,34**	**11,25**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukan peningkatan.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

(persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	108,63	115,16	120,71	126,82	131,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,10	122,21	128,16	136,36	137,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	112,42	121,78	133,66	143,64	153,85
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	113,74	114,29	124,64	134,57	137,02
5. Perubahan Inventori	139,34	- 75,05	114,76	100,79	157,92
6. Ekspor	73,62	107,03	142,58	119,19	110,88
7. Impor	76,89	126,38	133,61	119,11	114,18
PDRB	**115,13**	**121,68**	**128,88**	**136,06**	**140,20**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 2012 – 2016.

3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran yang cukup besar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Halmahera Tengah, ternyata sekitar sepertiganya masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012–2016, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya, kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta rupiah)	422 658,95	463 823,94	522 639,25	603 695,92	644 680,01
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	389 081,79	402 757,87	432 963,20	476 030,15	491 105,33
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	34,88	34,39	37,30	39,11	36,44
Rata-rata Konsumsi perkapita/Tahun (juta rupiah)					
a. ADHB	9,25	9,85	10,80	12,12	12,56
b. ADHK 2010	8,51	8,55	8,94	9,56	9,57
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	4,47	3,51	7,50	9,95	3,17
b. Perkapita	1,25	0,51	4,54	6,87	0,14
Jumlah Penduduk	**45 712**	**47 079**	**48 414**	**49 807**	**51 315**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2012–2016, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB relatif meningkat, meskipun di tahun 2016, proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB melambat. Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain, persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB

maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas), meskipun di tahun 2016 terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi.

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

(persen)

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman dan Rokok	54,2	51,8	50,6	51,5	51,9
2. Pakaian dan Alas Kaki	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,2	5,6	5,7	5,6	5,9
4. Kesehatan dan Pendidikan	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	30,4	32,2	32,6	31,3	30,3
6. Hotel dan Restoran	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1
7. Lainnya	4,1	4,1	4,8	5,3	5,4
Total Konsumsi Rumah Tangga	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2012-2016, secara keseluruhan, masyarakat atau rumah tangga cenderung menghabiskan pengeluaran konsumsinya untuk keperluan makanan, minuman, dan rokok dengan kontribusinya terhadap total pegeluaran di kisaran 50 s.d 55 persen. Kemudian pengeluaran terbesar berikutnya adalah pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga untuk komponen konsumsi Rumah tangga relatif tinggi. Selama periode 2012-2016 peningkatan harga tertinggi terjadi

pada harga kelompok perumahan, perkakas dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga yaitu 5 hingga 10 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

(persen)

Uraian	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman dan Rokok	3,2	4,5	5,2	4,5
2. Pakaian dan Alas Kaki	7,1	3,6	4,3	6,7
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,8	8,1	6,8	5,9
4. Kesehatan dan Pendidikan	4,7	6,3	5,7	6,9
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,7	3,6	3,8	0,5
6. Hotel dan Restoran	7,6	6,6	2,6	8,3
7. Lainnya	6,8	11,3	12,8	4,1
Total Konsumsi Rumah Tangga	6,0	4,8	5,1	3,5

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, meskipun di tahun 2016 terjadi perlambatan pengeluaran konsumsi LNPRT. Pada tahun 2012-2016, rata-rata tiap tahunnya meningkat 8 hingga 12 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 karena adanya momen kampanye

dan pemilihan presiden dan wakil presiden serta kampanye dan pemilihan anggota legislatif Kabupaten halmahera Tengah.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015x	2016xx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (juta rupiah)	14 551,88	17 160,17	20 049,62	23 251,99	23 884,61
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	12 753,09	14 041,20	15 644,75	17 052,24	17 316,56
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	1,20	1,27	1,43	1,51	1,35
Pertumbuhan (ADHK 2010)	**8,00**	**10,10**	**11,42**	**9,00**	**1,55**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Grafik 4. Konsumsi LNPRT ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016
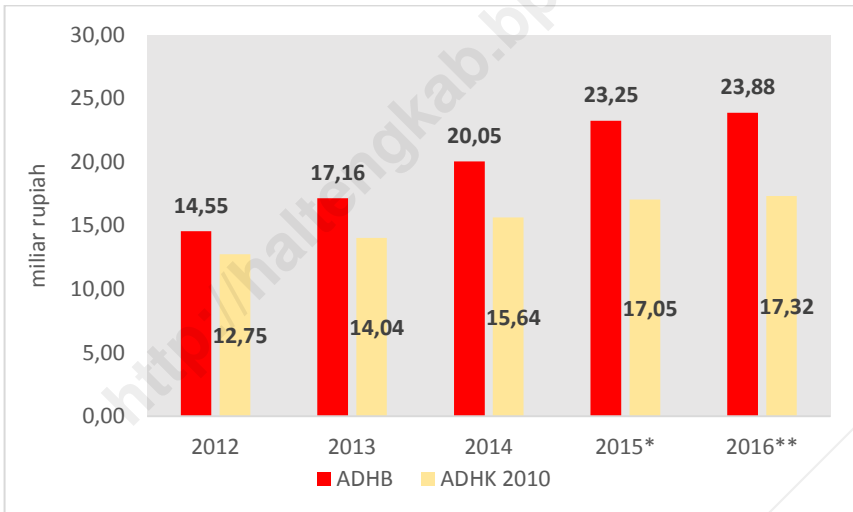
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Tentu hal ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sangat gencar melakukan pengeluaran-pengeluaran yang digunakan guna memicu adanya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah yang terus membaik.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (juta rupiah)	359 144,30	418 841,65	471 737,36	560 528,70	617 133,65
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	319 460,62	343 936,15	352 927,80	390 236,31	401 124,32
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	29,64	31,06	33,67	36,32	34,88
Pertumbuhan (ADHK 2010)	**7,68**	**7,66**	**2,61**	**10,57**	**2,79**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Grafik 5. Konsumsi LNPRT ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016
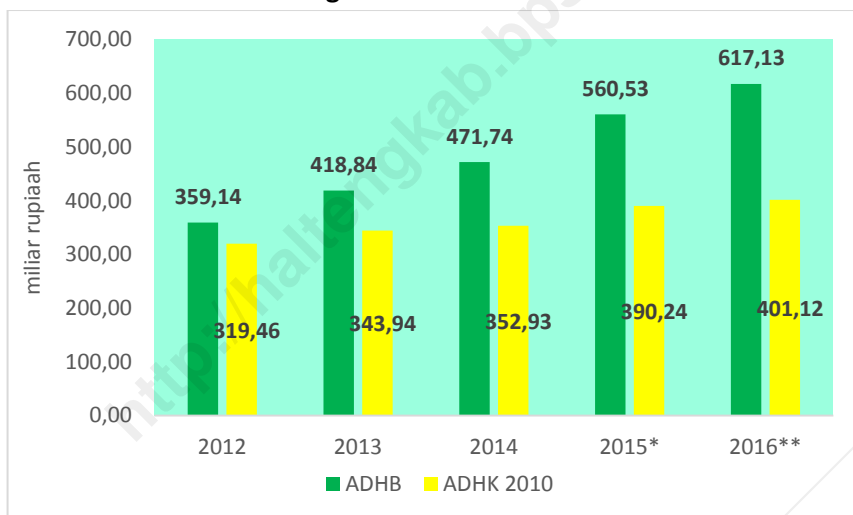
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2012-2016, pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan porsi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah dengan proporsi sebesar 29 s.d 37 persen dari total

PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada konsumsi pemerintah per-kapita.

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan PMTB dalam kurun waktu 2012–2016 nilainya terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2015, dimana nilai PMTBnya meningkat 15,17 persen. Hal ini disebabkan oleh pembangunan berbagai sarana perusahaan tambang seperti bagian pabrik baru dan smelter untuk mengolah hasil tambang. Selama periode tersebut, investasi fisik (PMTB) yang tercatat tidak hanya terfokus pada investasi bangunan saja, tetapi juga pada investasi non bangunan. Pembangunan atau investasi pada non bangunan mulai lebih besar porsinya dibanding PMTB bangunan sejak tahun 2014.

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015x	2016xx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (juta rupiah)	473 969,95	503 903,97	561 843,83	698 649,92	725 216,79
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	416 729,66	440 888,34	450 764,56	519 166,78	529 276,64
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	39,11	37,36	40,10	45,26	40,99
Struktur PMTB					
a. Bangunan (persen)	51,60	50,26	48,86	45,55	45,75
b. Non Bangunan (persen)	48,40	49,74	51,14	54,45	54,25
Pertumbuhan (ADHK 2010)					
Bangunan	12,89	3,78	1,03	7,64	2,07
Non Bangunan	16,00	7,71	3,35	21,92	1,85
Total PMTB	**14,46**	**5,80**	**2,24**	**15,17**	**1,95**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.5 Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan/atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau

pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB (juta rupiah)	75 055,32	53 700,92	- 23 700,79	130 631,71	- 21 063,04
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	53 863,04	- 71 555,28	- 20 651,59	129 608,83	- 13 337,78
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	6,19	3,98	- 1,69	8,46	- 1,19

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Dalam kurun waktu 2012-2016, nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, nilai ekspor barang dan jasa turun menjadi 407,77 miliar rupiah dari 594,8 miliar rupiah pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya penurunan

produktifas dalam menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual ke kabupaten lain. Selanjutnya pada 2014 dan tahun 2015, nilai ekspor barang dan jasa mulai perlahan naik meskipun ekspor ke luar negeri dari hasil tambang mentah dari nikel tidak diperbolehkan. Barulah di tahun 2016, hasil tambang nikel mulai di ekspor kembali dikarenakan mulai beroperasinya *smelter*.

Tabel 13. Perkembangan Ekspor Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (juta rupiah)	594 836,22	449 774,95	661 439,46	679 920,29	1 140 057,47
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	807 967,73	420 251,03	463 901,16	570 467,57	1 028 163,29
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	49,09	33,35	47,20	44,05	64,44
Pertumbuhan (ADHK 2010)	**1,13**	**- 47,99**	**10,39**	**22,97**	**80,23**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Grafik 6. Ekspor ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

miliar rupiaah
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
728,38
947,27
558,60
442,00
812,77
608,33
1 153,18
968,13
1 360,61
1 191,64
2012
2013
2014
2015*
2016**
ADHB
ADHK 2010
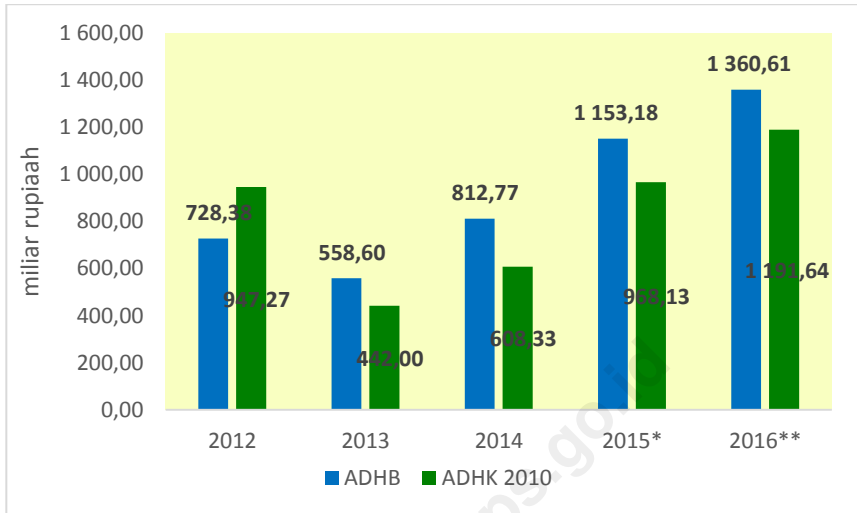
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.7 Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian

berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Halmahera Tengah di luar wilayah domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Halmahera Tengah terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa selama periode 2012-2016, nilai impor barang dan jasa Kabupaten Halmahera Tengah sedikit berfluaktif. Pada tahun 2013, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mengalami penurunan nilai yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor di tahun 2013 turun 53,34 persen menjadi 442,001 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki nilai impor sebesar 947,27 miliar rupiah. Hal ini merupakan imbas dari turunnnya nilai ekspor yang saling berpengaruh terhadap impor.

Tabel 14. Perkembangan Impor Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (juta rupiah)	728 380,50	558 601,35	812 769,80	1 153 181,63	1 360 609,89
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	947 268,65	442 001,18	608 326,69	968 130,84	1 191 640,65
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	60,11	41,42	58,00	74,71	76,90
Pertumbuhan (ADHK 2010)	**6,77**	**- 53,34**	**37,63**	**59,15**	**23,09**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Grafik 7. Impor ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016
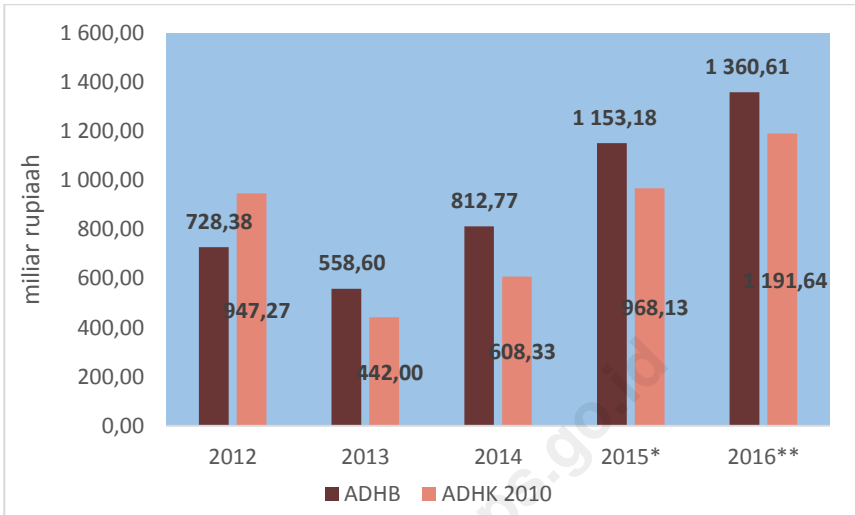
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2012-2016

4.1 PDRB Nominal

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah , dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Berdasarkan tabel di atas, PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan perkembangan yang sedikit fluktuatif selama tahun 2012-2016, yang agak berbeda dengan kenaikan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi, setiap penduduk Kabupaten Halmahera Tengah rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Selama periode tersebut, setiap penduduk mampu menciptakan nilai tambah ekonomi di atas 20 juta rupiah, baik untuk PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015x	2016xx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (juta rupiah)					
a. ADHB	1 211 836,12	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 769 299,60
b. ADHK 2010	1 052 587,28	1 108 318,14	1 087 223,19	1 134 431,04	1 262 007,71
PDRB perkapita (juta rupiah)					
a. ADHB	26,51	28,65	28,94	30,99	34,48
b. ADHK 2010	23,03	23,54	22,46	22,78	24,59
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK	1,78	2,24	- 4,61	1,42	7,98
Jumlah Penduduk	**45 712,00**	**47 079,00**	**48 414,00**	**49 807,00**	**51 315,00**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, dan proporsinya terhadap PDRB juga cenderung mengalami peningkatan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (juta rupiah)					
a. Rumah Tangga	422 658,95	463 823,94	522 639,25	603 695,92	644 680,01
b. LNPRT	14 551,88	17 160,17	20 049,62	23 251,99	23 884,61
c. Pemerintah	359 144,30	418 841,65	471 737,36	560 528,70	617 133,65
Jumlah	796 355,13	899 825,76	1 014 426,23	1 187 476,61	1 285 698,27
PDRB ADHB (juta rupiah)	1 211 836,12	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 769 299,60
Proporsi	**65,71**	**66,72**	**72,39**	**76,93**	**72,67**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.3 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor, kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 17. Rasio Ekspor Terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor ADHB (juta rupiah)	594 836,22	449 774,95	661 439,46	679 920,29	1 140 057,47
Total PMTB ADHB (juta rupiah)	473 969,95	503 903,97	561 843,83	698 649,92	725 216,79
Rasio Ekspor Terhadap PMTB	**1,26**	**0,89**	**1,18**	**0,97**	**1,57**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dapat dilihat pada di atas, pada tahun 2012-2016, ekspor mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Nilai rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.4 Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh luar daerah. Jika rasionya kecil, berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya, jika rasionya besar, berarti ketergantungan akan impor semakin rendah.

Tabel 18. Rasio PDRB Terhadap Impor Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015x	2016xx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHB (juta rupiah)	1 211 836,12	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 769 299,60
Total Impor ADHB (juta rupiah)	728 380,50	558 601,35	812 769,80	1 153 181,63	1 360 609,89
Rasio PDRB Terhadap Impor	**1,66**	**2,41**	**1,72**	**1,34**	**1,30**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2012–2016 cenderung menurun meskipun di tahun 2013 terjadi peningkatan rasio. Penurunan rasio menunjukkan meningkatnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor pada tahun 2012 hingga 2016.

4.5 Keseimbangan Total Persediaan dan Permintaan

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui

keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*). Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, dengan rentang 29 hingga 43 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru dipenuhi sekitar 60 persen dari selisih hasil produksi. Dalam kurun waktu tahun 2012–2016 tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat berfluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 19. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB ADHB (juta rupiah)	1 211 836,12	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 769 299,60
%	62,46	70,71	63,29	57,24	56,53
Total Nilai Impor ADHB (juta rupiah)	728 380,50	558 601,35	812 769,80	1 153 181,63	1 360 609,89
%	37,54	29,29	36,71	42,76	43,47
Total Permintaan Akhir (juta rupiah)	**1 940 216,62**	**1 907 205,59**	**2 214 008,73**	**2 696 678,53**	**3 129 909,49**
%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.6 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output

adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit, dimana formula yang digunakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t **= PMTB tahun ke t**

Y_t **=** ***Output*** **tahun ke t**

Y_{t-1} **=** ***Output*** **tahun ke t-1**

Tabel 20. ***Incremental Capital Output Ratio*** **Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (juta rupiah)					
PDRB ADHK 2010 (juta rupiah)	1 052 587,28	1 108 318,14	1 087 223,19	1 134 431,04	1 262 007,71
Perubahan PDRB (juta rupiah)	50 328,30	55 730,86	- 21 094,95	47 207,85	127 576,67
PMTB ADHK 2010 (juta rupiah)	416 729,66	440 888,34	450 764,56	519 166,78	529 276,64
ICOR	8,28	7,91	- 21,37	11,00	4,15

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 hingga 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data tahun 2012 hingga 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2012-2016 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015^x	2016^xx
	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)**	**356,7**	**393,2**	**422,7**	**463,8**	**522,6**	**603,7**	**644,7**
1.a.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	175,5	186,6	191,4	197,3	214,7	254,1	271,7
1.b.	Minuman Beralkohol dan Rokok	29,3	33,3	37,6	42,9	49,8	57,1	62,9
1.c.	Pakaian	9,0	10,8	11,3	12,7	14,3	16,3	18,2
1.d.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	12,8	14,5	16,2	18,9	21,6	24,6	27,5
1.e.	Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,6	5,2	5,8	6,9	8,0	9,4	10,7
1.f.	Kesehatan	3,9	4,2	4,4	4,8	5,4	6,2	7,0
1.g.	Transportasi/Angkutan	13,8	15,2	17,8	20,0	22,5	25,5	27,5
1.h.	Komunikasi	11,5	12,8	14,4	17,2	19,2	22,0	23,1
1.i.	Rekreasi dan Budaya	75,2	87,0	96,3	112,3	128,8	141,7	144,7
1.j.	Pendidikan	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,8	3,1
1.k.	Penginapan dan Hotel	5,9	6,8	8,3	9,8	10,8	12,2	13,4
1.l.	Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	13,4	15,0	17,2	19,0	25,1	31,9	34,8
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**11,1**	**12,4**	**14,6**	**17,2**	**20,0**	**23,3**	**23,9**
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**262,6**	**324,8**	**359,1**	**418,8**	**471,7**	**560,5**	**617,1**
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)**	**288,9**	**387,6**	**474,0**	**503,9**	**561,8**	**698,6**	**725,2**
4.a.	Bangunan	159,4	187,2	244,6	253,2	274,5	318,3	331,8
4.b.	Non-Bangunan	129,5	200,5	229,4	250,7	287,3	380,4	393,4
5	**Perubahan Inventori**	**40,8**	**51,9**	**75,1**	**53,7**	**-23,7**	**130,6**	**-21,1**
6	**Ekspor Luar Negeri**	**10,4**	**20,1**	**21,1**	**30,3**	**0,0**	**0,0**	**499,1**
7	**Impor Luar Negeri**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**511,5**	**679,5**
8	**Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)**	**-18,2**	**-112,5**	**-154,7**	**-139,1**	**-151,3**	**38,2**	**-40,2**
8.a.	Ekspor Antar Daerah	738,7	642,6	573,7	419,5	661,4	679,9	641,0
8.b.	Impor Antar Daerah	756,9	755,2	728,4	558,6	812,8	641,7	681,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**952,2**	**1 077,4**	**1 211,8**	**1 348,6**	**1 401,2**	**1 543,5**	**1 769,3**

Lampiran 2. **PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2012-2016 (miliar rupiah)**

		Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015ˣ	2016ˣˣ
		(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)**	**356,7**	**372,4**	**389,1**	**402,8**	**433,0**	**476,0**	**491,1**
	1.a.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	175,5	180,6	182,9	184,7	194,1	218,0	224,1
	1.b.	Minuman Beralkohol dan Rokok	29,3	30,4	31,8	33,4	35,8	39,2	40,7
	1.c.	Pakaian	9,0	9,4	9,7	10,2	11,1	12,1	12,7
	1.d.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	12,8	13,4	13,7	14,5	15,5	16,7	17,8
	1.e.	Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,6	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6
	1.f.	Kesehatan	3,9	4,1	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0
	1.g.	Transportasi/Angkutan	13,8	14,8	16,3	16,9	18,0	19,5	20,8
	1.h.	Komunikasi	11,5	12,3	12,9	13,5	14,8	16,6	17,1
	1.i.	Rekreasi dan Budaya	75,2	79,9	87,7	93,6	103,7	109,8	111,9
	1.j.	Pendidikan	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,3	2,4
	1.k.	Penginapan dan Hotel	5,9	6,4	7,2	7,8	8,1	9,0	9,1
	1.l.	Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	13,4	14,7	15,7	16,3	19,3	21,8	22,8
2		**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**11,1**	**11,8**	**12,8**	**14,0**	**15,6**	**17,1**	**17,3**
3		**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**262,6**	**296,7**	**319,5**	**343,9**	**352,9**	**390,2**	**401,1**
4		**Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)**	**288,9**	**364,1**	**416,7**	**440,9**	**450,8**	**519,2**	**529,3**
	4.a.	Bangunan	159,4	179,9	203,1	210,7	212,9	229,2	233,9
	4.b.	Non-Bangunan	129,5	184,2	213,7	230,1	237,8	290,0	295,4
5		**Perubahan Inventori**	**40,8**	**45,5**	**53,9**	**-71,6**	**-20,7**	**129,6**	**-13,3**
6		**Ekspor Luar Negeri**	**10,4**	**22,1**	**23,5**	**33,5**	**0,0**	**0,0**	**448,4**
7		**Impor Luar Negeri**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**378,0**	**513,7**
8		**Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)**	**-18,2**	**-110,3**	**-162,8**	**-55,2**	**-144,4**	**-19,7**	**-98,1**
	8.a.	Ekspor Antar Daerah	738,7	776,8	784,5	386,8	463,9	570,5	579,8
	8.b.	Impor Antar Daerah	756,9	887,2	947,3	442,0	608,3	590,2	677,9
		PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**952,2**	**1.002,3**	**1 052,6**	**1 108,3**	**1 087,2**	**1 134,4**	**1 262,0**

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)

		Kategori	2010	2011	2012	2013	2014	2015^x	2016^xx
		(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)**		**37,5**	**36,5**	**34,9**	**34,4**	**37,3**	**39,1**	**36,4**
	1.a.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	18,4	17,3	15,8	14,6	15,3	16,5	15,4
	1.b.	Minuman Beralkohol dan Rokok	3,1	3,1	3,1	3,2	3,6	3,7	3,6
	1.c.	Pakaian	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,0
	1.d.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
	1.e.	Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
	1.f.	Kesehatan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	1.g.	Transportasi/Angkutan	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6
	1.h.	Komunikasi	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3
	1.i.	Rekreasi dan Budaya	7,9	8,1	7,9	8,3	9,2	9,2	8,2
	1.j.	Pendidikan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	1.k.	Penginapan dan Hotel	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
	1.l.	Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	2,1	2,0
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**		**1,2**	**1,1**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,3**
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**		**27,6**	**30,1**	**29,6**	**31,1**	**33,7**	**36,3**	**34,9**
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)**		30,3	36,0	39,1	37,4	40,1	45,3	41,0
	4.a.	Bangunan	16,7	17,4	20,2	18,8	19,6	20,6	18,8
	4.b.	Non-Bangunan	**13,6**	**18,6**	**18,9**	**18,6**	**20,5**	**24,6**	**22,2**
5	**Perubahan Inventori**		4,3	4,8	6,2	4,0	-1,7	8,5	-1,2
6	**Ekspor Luar Negeri**		1,1	1,9	1,7	2,2	0,0	0,0	28,2
7	**Impor Luar Negeri**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	38,4
8	**Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)**		-1,9	-10,4	-12,8	-10,3	-10,8	2,5	-2,3
	8.a.	Ekspor Antar Daerah	77,6	59,6	47,3	31,1	47,2	44,1	36,2
	8.b.	Impor Antar Daerah	**79,5**	**70,1**	**60,1**	**41,4**	**58,0**	**41,6**	**38,5**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lampiran 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen)

	Kategori		2011	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
	(1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)**		**4,4**	**4,5**	**3,5**	**7,5**	**9,9**	**3,2**
	1.a.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,9	1,3	1,0	5,1	12,3	2,8
	1.b.	Minuman Beralkohol dan Rokok	3,7	4,6	5,0	7,2	9,5	3,8
	1.c.	Pakaian	4,8	3,5	4,5	8,6	9,4	4,9
	1.d.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	4,2	2,2	6,2	6,5	7,7	6,8
	1.e.	Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,2	9,9	7,1	5,2	7,2	4,6
	1.f.	Kesehatan	4,1	1,1	4,0	5,3	7,2	5,0
	1.g.	Transportasi/Angkutan	6,9	10,4	3,6	6,8	8,3	6,6
	1.h.	Komunikasi	7,0	4,6	4,7	9,3	12,1	3,4
	1.i.	Rekreasi dan Budaya	6,2	9,8	6,7	10,8	5,9	1,9
	1.j.	Pendidikan	4,2	2,2	4,6	9,0	8,4	6,2
	1.k.	Penginapan dan Hotel	7,0	12,6	9,6	3,6	10,2	1,2
	1.l.	Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	9,5	6,8	3,7	18,9	12,6	4,6
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**		**6,7**	**8,0**	**10,1**	**11,4**	**9,0**	**1,6**
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**		**13,0**	**7,7**	**7,7**	**2,6**	**10,6**	**2,8**
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)**		26,0	14,5	5,8	2,2	15,2	1,9
	4.a.	Bangunan	12,9	12,9	3,8	1,0	7,6	2,1
	4.b.	Non-Bangunan	**42,2**	**16,0**	**7,7**	**3,3**	**21,9**	**1,9**
5	**Perubahan Inventori**		11,6	18,3	-232,8	-71,1	-727,6	-110,3
6	**Ekspor Luar Negeri**		113,1	6,2	42,6	-100,0	NA	NA
7	**Impor Luar Negeri**		NA	NA	NA	NA	NA	35,9
8	**Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)**		505,1	47,5	-66,1	161,6	-86,4	397,8
	8.a.	Ekspor Antar Daerah	5,2	1,0	-50,7	19,9	23,0	1,6
	8.b.	Impor Antar Daerah	**17,2**	**6,8**	**-53,3**	**37,6**	**-3,0**	**14,9**
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,3**	**5,0**	**5,3**	**-1,9**	**4,3**	**11,2**

Lampiran 5. **Indeks Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016**

		Kategori	2010	2011	2012	2013	2014	2015[x]	2016[xx]
		(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)**		**100,0**	**105,6**	**108,6**	**115,2**	**120,7**	**126,8**	**131,3**
	1.a.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	100,0	103,3	104,6	106,8	110,6	116,5	121,3
	1.b.	Minuman Beralkohol dan Rokok	100,0	109,3	118,2	128,2	139,0	145,4	154,6
	1.c.	Pakaian	100,0	114,3	116,3	124,5	129,0	134,5	143,6
	1.d.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	100,0	108,0	118,6	130,1	139,4	147,7	154,5
	1.e.	Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	100,0	108,7	111,4	122,5	135,6	147,9	161,8
	1.f.	Kesehatan	100,0	103,2	106,9	111,8	121,2	128,9	138,6
	1.g.	Transportasi/Angkutan	100,0	102,9	109,3	118,5	125,1	130,9	132,2
	1.h.	Komunikasi	100,0	104,1	111,7	127,6	129,9	133,0	135,1
	1.i.	Rekreasi dan Budaya	100,0	108,9	109,7	120,0	124,2	129,0	129,3
	1.j.	Pendidikan	100,0	104,3	107,9	113,3	115,5	120,5	127,0
	1.k.	Penginapan dan Hotel	100,0	107,6	115,6	124,4	132,7	136,1	147,5
	1.l.	Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	100,0	102,0	109,4	116,8	130,0	146,6	152,7
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**		**100,0**	**104,7**	**114,1**	**122,2**	**128,2**	**136,4**	**137,9**
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**		**100,0**	**109,5**	**112,4**	**121,8**	**133,7**	**143,6**	**153,9**
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)**		100,0	106,5	113,7	114,3	124,6	134,6	137,0
	4.a.	Bangunan	100,0	104,1	120,4	120,2	128,9	138,9	141,8
	4.b.	Non-Bangunan	**100,0**	**108,8**	**107,4**	**108,9**	**120,8**	**131,2**	**133,2**
5	**Perubahan Inventori**		100,0	113,9	139,3	-75,0	114,8	100,8	157,9
6	**Ekspor Luar Negeri**		100,0	91,1	90,0	90,5	NA	NA	111,3
7	**Impor Luar Negeri**		NA	NA	NA	NA	NA	135,3	132,3
8	**Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)**		100,0	102,0	95,0	252,0	104,8	-193,9	40,9
	8.a.	Ekspor Antar Daerah	100,0	82,7	73,1	108,5	142,6	119,2	110,6
	8.b.	Impor Antar Daerah	**100,0**	**85,1**	**76,9**	**126,4**	**133,6**	**108,7**	**100,5**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			**100,0**	**107,5**	**115,1**	**121,7**	**128,9**	**136,1**	**140,2**

Lampiran 6. **Laju Pertumbuhan Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016**

	Kategori		2011	2012	2013	2014	2015^x	2016^xx
	(1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)**		**5,6**	**2,9**	**6,0**	**4,8**	**5,1**	**3,5**
	1.a.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,3	1,3	2,1	3,5	5,4	4,0
	1.b.	Minuman Beralkohol dan Rokok	9,3	8,1	8,5	8,4	4,6	6,3
	1.c.	Pakaian	14,3	1,8	7,1	3,6	4,3	6,7
	1.d.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	8,0	9,8	9,7	7,1	6,0	4,6
	1.e.	Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	8,7	2,5	10,0	10,7	9,1	9,4
	1.f.	Kesehatan	3,2	3,6	4,6	8,4	6,4	7,5
	1.g.	Transportasi/Angkutan	2,9	6,2	8,4	5,5	4,6	1,0
	1.h.	Komunikasi	4,1	7,3	14,3	1,8	2,4	1,6
	1.i.	Rekreasi dan Budaya	8,9	0,7	9,3	3,5	3,9	0,2
	1.j.	Pendidikan	4,3	3,4	5,0	2,0	4,3	5,4
	1.k.	Penginapan dan Hotel	7,6	7,5	7,6	6,6	2,6	8,3
	1.l.	Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	2,0	7,3	6,8	11,3	12,8	4,1
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**		**4,7**	**8,9**	**7,1**	**4,9**	**6,4**	**1,2**
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**		**9,5**	**2,7**	**8,3**	**9,8**	**7,5**	**7,1**
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)**		6,5	6,8	0,5	9,1	8,0	1,8
	4.a.	Bangunan	4,1	15,8	-0,2	7,3	7,7	2,1
	4.b.	Non-Bangunan	8,8	-1,3	1,4	10,9	8,6	1,5
5	**Perubahan Inventori**		13,9	22,3	-153,9	-252,9	-12,2	56,7
6	**Ekspor Luar Negeri**		-8,9	-1,3	0,6	NA	NA	NA
7	**Impor Luar Negeri**		**NA**	NA	NA	NA	NA	-2,3
8	**Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)**		2,0	-6,8	165,2	-58,4	-285,0	-121,1
	8.a.	Ekspor Antar Daerah	-17,28	-11,6	48,3	31,5	-16,4	-7,2
	8.b.	Impor Antar Daerah	**-14,88**	**-9,7**	**64,4**	**5,7**	**-18,6**	**-7,6**
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**7,5**	**7,1**	**5,7**	**5,9**	**5,6**	**3,0**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
JL. Poros Weda Payahe
Email : bps8202@mailhost.bps.go.id
Homepage : haltengkab.bps.go.id